
Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Rumahan Di Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo

Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of the Home Industry Development Program in Ngadikusuman Village, Kertek District, Wonosobo Regency

Anak Agung Ayu Uttari Kartika Dewi Karang

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

* Penulis Korespondensi: uttarikarang@gmail.com

Abstract:

This research aims to assess the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Home Industry Development Program. Employing a qualitative approach with a case study design, this study involved informants comprising facilitators and home industry operators in Ngadikusuman Village, representatives from the Wates Economic Creative Power (WECP), and the Coordinating Ministry for Economic Affairs (MoWECP). Data collection methods included semi-structured interviews and a literature review. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that supporting factors for this program include the limited number of government programs specifically targeting ultra-micro enterprises, the active roles of various stakeholders from the central to the village level, the diverse benefits experienced by home industry operators post-participation, and the effectiveness and targeted nature of equipment assistance, mentoring, and training. Conversely, identified inhibiting factors encompass budget limitations for annual data collection, the low human resource capacity of home industry operators, difficulties in raw material procurement, product changes by some participants, limited collateral and business capital, a lack of discipline among home industry operators in utilizing loan funds, a reluctance among operators to pursue certification independently, and limited understanding of information technology utilization.

Keywords: Home Industry Development Program, Obstacles, Supporters

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat implementasi Program Pengembangan Industri Rumahan di Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini melibatkan informan kunci yang terdiri dari pendamping program dan pelaku industri rumahan di Desa Ngadikusuman, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi literatur. Analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa faktor pendukung keberhasilan program, di antaranya: terbatasnya inisiatif program pemerintah yang secara spesifik menyasar sektor usaha ultra-mikro; sinergi peran aktif dari tingkat kebijakan pusat hingga implementasi di tingkat desa; persepsi manfaat signifikan yang dirasakan oleh pelaku industri rumahan pasca partisipasi dalam program; serta efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyediaan bantuan peralatan, pendampingan, dan pelatihan. Sebaliknya, faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi: alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan pendataan tahunan; kapasitas sumber daya manusia pelaku industri rumahan yang relatif rendah; fluktuasi ketersediaan bahan baku; inkonsistensi produk yang dihasilkan oleh sebagian pelaku usaha; keterbatasan aset sebagai agunan dan akses terhadap modal usaha; kurangnya kedisiplinan pelaku industri rumahan dalam pengelolaan dana pinjaman; rendahnya inisiatif pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi produk secara mandiri; serta keterbatasan pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi di kalangan pelaku industri rumahan.

Kata kunci : Pendukung, Penghambat, Program Pengembangan Industri Rumahan

1. Pendahuluan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan. Pengembangan Industri Rumahan (IR) diharapkan mampu memberikan solusi alternatif bagi perempuan sehingga kondisi ekonomi mereka tetap stabil atau bahkan meningkatkan perekonomiannya. Industri rumahan merepresentasikan salah satu kategori usaha mikro yang berbasis di kediaman, dengan mayoritas pelakunya adalah perempuan. Keberadaan sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, penciptaan lapangan kerja, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi (Hartati, et.al., 2024).

Untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut, Kemen PPPA juga memfasilitasi keberadaan pendamping lapangan sebagai perpanjangan tangan tim Daerah kepada pelaku IR, agar mencapai kondisi produk yang berkualitas, membantu meningkatkan kualitas produk, akses informasi, permodalan dan perizinan serta mendorong jaringan pasar yang memadai. Selain itu, sebagai pendamping juga diharapkan mampu memahami strategi pengorganisasian masyarakat khususnya perempuan dan pengembangan usaha IR secara utuh, baik soal teknis maupun perspektif gender dalam usaha.

Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu dari 21 wilayah yang terpilih menjadi lokasi pilot project Industri Rumahan. Hal ini disebabkan karena Wonosobo merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak Industri Rumahan yang dikelola oleh perempuan dan berada dalam kategori ultra mikro skala berskala rumah tangga, sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut. Program pendampingan dilakukan selama 3 tahun, yang kemudian akan dilanjutkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang utamanya adalah Dinas PPPA dengan pelibatan berbagai stakeholders lain seperti Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, serta dinas – dinas terkait lainnya dan berbagai sektor non pemerintah. Salah satu piloting project piloting project yang menjadi best practices dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Rumahan adalah Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

MoU antara Kemen PPPA dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kabupaten Wonosobo terkait Pilot Project Industri Rumahan telah berakhir pada tahun 2018 dan hal ini menyebabkan hilangnya anggaran dari pusat untuk fasilitasi Industri Rumahan sehingga saat ini tidak ada lagi pemantauan secara intensif terkait perkembangan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh perempuan pelaku Industri Rumahan di Desa Ngadikusuman. Oleh karena itu perlu dikaji faktor pendukung dan penghambat pada program Industri rumahan di Desa Ngadikusuman.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan salah satu eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih (Sugiyono, 2009). Penelitian studi kasus, sebagai salah satu pendekatan dalam metodologi kualitatif, memfokuskan inkiri pada serangkaian fenomena yang diteliti secara mendalam untuk mengidentifikasi relasi di antaranya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kejadian atau situasi serta perilaku manusia berdasarkan interpretasi dan opini yang dikemukakan (Ilhami, et.al., 2024).

Subjek penelitian atau sumber informasi dalam penelitian ini antara lain :

Pendamping Industri Rumahan yaitu Ibu Mia Ariana (Pendamping ASPPUK) serta Ibu Maizidah Salas dan Ibu Aliyah Nurrohmah (Pendamping Lokal Desa Ngadikusuman), Pelaku Industri Rumahan yaitu Ibu Umi Mutafiah yang merupakan Pelaku IR 1, Ibu Rini Listiyani yang merupakan Pelaku IR 2, dan Ibu Saidah yang merupakan pelaku IR 3. Dinas PPPA yaitu Kasie Dinas PPPA Wonosobo Ibu Umi Rahayu, Kemen PPPA (pusat) yaitu Bapak Muhammad Ihsan dan Ibu Eko Novi sebagai mantan Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, pihak yang menginisiasi Program Pengembangan Industri Rumahan di 21 Kabupaten Kota.

Macam data penelitian ini antara lain data primer yaitu wawancara informan dan data sekunder yaitu dari hasil metode dokumentasi, referensi buku, arsip, jurnal dan keterangan-keterangan lain yang ada di sekitar objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian

ini melakukan reduksi data dengan merangkum hal yang didapat dari pengumpulan data, menyajikan data dengan penyajian teks yang bersifat naratif dan verifikasi dengan melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Industri Rumahan Desa Ngadikusuman

Desa Ngadikusuman adalah salah satu desa di Kecamatan Kertek yang menjadi salah satu sektor penting berjalannya roda perekonomian, karena Kecamatan Kretek sendiri merupakan barometer ekonomi kedua setelah ibu kota Wonosobo karena letaknya yang strategis sehingga sangat mendukung berkembangnya dunia usaha yang mampu meningkatkan taraf ekonomi. Adapun potensi unggulan meliputi produk olahan makanan, tanaman sayur mayur, perkebunan teh, tanaman padi dan jangung, palawija dan cabe serta tanaman tembakau. Tidak heran kalau mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai pengusaha olahan makanan dan petani.

Jumlah perempuan pelaku Industri Rumahan yang dipetakan di Desa Ngadikusuman dan menerima bantuan terdapat 180 orang, terdiri dari 100 orang di tahun 2016 menggunakan anggaran dari KemenPPPA dan 80 orang di tahun 2023 menggunakan anggaran Dinas PPPA. Berdasarkan kategori tingkat usaha di Desa Ngadikusuman ditemukan 1 orang yang masih berada di kategori IR 1, 82 orang di kategori IR 2 dan 17 orang di kategori IR 3. Kemudian berdasarkan analisis kebutuhan, jenis usaha yang bisa dikembangkan dengan baik di Desa Ngadikusuman adalah usaha boga, rincinya seperti tabel 1.

Tabel 1. Jenis Usaha Perempuan Pelaku Industri Rumahtangga di Desa Ngadikusuman

No	Jenis Usaha	Jumlah Industri Rumahtangga
1.	Petos/Keripik	7
2.	Rengginang	18
3.	Gorengan	21
4.	Nasi goreng/nasi kuning/nasi megono	11
5.	Jamu gendong	4
6.	Jenang	2
7.	Jajan pasar/jajan anak/kue basah	14
8.	Sayur/warung makan	2
9.	Bakso/soto/angkringan/siomay/cimol/batagor	19
10.	Irig	1
11.	Penjahit	1
Total		100

Dari sisi kebutuhan yang diharapkan, para perempuan pelaku IR menginginkan adanya bantuan alat, bantuan pelatihan dan pendampingan. Adapun pelatihan yang diharapkan yaitu pelatihan tata boga, packaging, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan dapat dilihat Gambar 1. Dalam mendukung implementasi Program Pengembangan Industri Rumahan di Desa Ngadikusuman, sinergi lintas sektoral terjalin melalui tim pelaksana di tingkat daerah, melengkapi dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tim pelaksana ini terdiri dari Tim Industri Rumahan Kabupaten Wonosobo dan Tim Industri Rumahan Desa Ngadikusuman, yang merepresentasikan integrasi struktural dari tingkat kebijakan hingga implementasi di lapangan.



Gambar 1. Pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan

Struktur Tim Pelaksana Kabupaten melibatkan Sekretaris Daerah sebagai koordinator, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai ketua tim, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sebagai sekretaris, serta anggota yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. OPD tersebut meliputi DPPPA, BAPPEDA, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Inspektorat, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu, keterlibatan akademisi dari Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Kalibeber, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Dharma Wanita turut memperkuat kapasitas tim pelaksana. Tim pelaksana tingkat desa terdiri dari Kepala Desa Ngadikusuman selaku koordinator, Sekretaris Desa sebagai ketua tim, Kaur Perencanaan Pembangunan sebagai sekretaris, dan anggotanya merupakan pegawai Kantor Desa Ngadikusuman, Kepala Dusun dari keempat dusun di Desa Ngadikusuman, BPD, LPMD, ketua PKK, serta pelaku Industri Rumahan itu sendiri.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Industri Rumahan

3.2.1. Faktor Pendukung

Keberlanjutan IR di Desa Ngadikusuman sudah baik karena Dinas PPPA tidak lepas tangan walaupun karena keterbatasan anggaran sehingga tidak memungkinkan untuk tetap melakukan pendampingan seperti saat masih difasilitasi Kemen PPPA. Baru – baru ini Pelaku IR dimintai bantuan untuk memproduksi APD. Selain itu Dinas PPPA masih membantu menginfokan apabila ada pengurusan label halal, PIRT serta sertifikasi- sertifikasi bersubsidi lainnya. Namun kekurangannya adalah sudah tidak adanya pendamping dan monitoring evaluasi secara berkala untuk membuat data time series terkait profil pelaku IR. Pihak yang turut mendukung kesuksesan pelaksanaan Program Pengembangan Industri Rumahan ini adalah Kemen PPPA, Dinas PPPA, pendamping lokal desa dan pendamping dari lembaga masyarakat yaitu ASPPUK; tim pelaksana IR mulai dari Desa sampai Kabupaten (termasuk dinas terkait contohnya Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan dll); tim penggerak PKK desa dan kecamatan; Lembaga Masyarakat; serta Dunia Usaha.

Faktor yang membuat Program Pengembangan Industri Rumahan perlu untuk dilanjutkan, karena meliki beberapa pendukung antara lain:

1. Masih jarangnya program pemerintah yang menyasar pada pelaku usaha ultra mikro dengan pemetaan yang mendalam sehingga program ini sangat diminati. Adanya peluang peningkatan pemanfaatan dana desa untuk keberlanjutan program Industri Rumahan agar dana desa tidak hanya digunakan untuk infrastruktur saja. Namun perlu didukung dengan adanya adanya finalisasi NSPK oleh Kemen PPPA sebagai landasan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan industri rumahan di daerah.
2. Peran aktif dari seluruh pihak mulai dari Kemen PPPA, Dinas PPPA, pendamping lokal desa dan pendamping dari lembaga masyarakat yaitu ASPPUK; tim pelaksana IR mulai dari Desa sampai Kabupaten (termasuk dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, dll); tim penggerak PKK desa dan kecamatan; Lembaga Masyarakat, Universitas dan Dunia Usaha.
3. Keberlanjutan IR di Desa Ngadikusuman sudah baik karena walaupun program telah selesai Dinas PPPA masih membantu menginfokan apabila ada pengurusan label halal, PIRT serta sertifikasi bersubsidi lainnya.
4. Banyaknya manfaat yang dirasakan perempuan Pelaku IR setelah mengikuti program ini antara lain: meningkatkan produksi dan kualitas produk pelaku IR; menambah wawasan dan kapasitas perempuan pelaku IR; mendorong diversifikasi produk yang dihasilkan; terbentuknya pra koperasi dan simpan pinjam; memperluas jangkauan pasar; fasilitasi PIRT, NIB, IUMK, dan label halal gratis; memahami pembukuan usaha dengan baik serta cara menentukan harga produk; fasilitasi pemasaran online, pendampingan olahan pangan, serta peningkatan akses modal usaha dari perbankan; kesempatan mengikuti expo meningkat.
5. Bantuan yang diberikan oleh Kemen PPPA dan Dinas PPPA sudah tepat guna dan sasaran karena sebelum diberikan sudah dilakukan need assessment sehingga telah terpetakan dengan baik kebutuhan para pelaku IR apa saja serta identifikasinya. Setelahnya baru diberikan pelatihan serta bantuan alat produksi yang memang mereka butuhkan.

Usaha yang dilakukan oleh Pelaku Industri Rumahan di Desa Ngadikusuman belum dilakukan secara berkelompok, masih sendiri – sendiri karena produk yang dihasilkan juga bervariasi. Namun untuk program pendampingan secara umum dilakukan berkelompok, akhirnya kelompok hanya menjadi wadah bertukar pikiran dan sebagai support group. Saat itu sempat berencana untuk membuat toko oleh – oleh bersama namun belum terealisasikan.

Manfaat yang dirasakan oleh Pelaku Industri Rumahan setelah mengikuti program ini antara lain: meningkatkan produksi dan kualitas produk pelaku IR; menambah wawasan dan kapasitas pelaku IR; mendorong diversifikasi produk yang dihasilkan; terbentuknya prakoperasi dan simpan pinjam; memperluas jangkauan pasar; fasilitasi PIRT, NIB, IUMK, dan label halal gratis; memahami pembukuan usaha dengan baik serta cara menentukan harga produk; fasilitasi pemasaran online, pendampingan olahan pangan, serta peningkatan akses modal usaha dari perbankan; kesempatan mengikuti expo meningkat. Semua hal ini tentunya berujung pada peningkatan ekonomi keluarga, sejalan dengan penelitian Setiawan et al (2018) yaitu ada perubahan yang dirasakan peserta setelah mengikuti pelatihan menjahit yang diselenggarakan oleh PKBM Ngupoyo Ilmu yaitu mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

3.2.2. Faktor Penghambat

Kendala yang menghambat keberhasilan Program Pengembangan Industri Rumahan antara lain:

1. keterbatasan anggaran untuk pendataan tahunan mengenai kategori IR 1, 2, 3 dan yang sudah mentas dan saat ini sudah menjadi binaan Dinas KUKM;
2. kemampuan SDM perempuan pelaku IR yang rendah;
3. ketersediaan bahan baku seringkali sulit tersedia;
4. ada beberapa pelaku IR yang seringkali berganti – ganti produk;
5. keterbatasan modal usaha; keterbatasan agunan untuk mendapatkan akses ke perbankan;
6. setelah mendapatkan pinjaman pelaku IR seringkali kurang disiplin dan menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif.

Temuan ini selaras dengan penelitian Indriyatni (2013) yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha mikro dan kecil. Lebih lanjut, hal ini diperkuat oleh perspektif teoretis Andreas (2011), yang mengidentifikasi keterbatasan modal sebagai kendala signifikan bagi keberlanjutan usaha kecil, terutama dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Selain itu, praktik pencampuran keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga pelaku usaha memperburuk situasi ini. Amalgamasi dana operasional dengan kebutuhan konsumsi pribadi menghambat akumulasi modal dan reinvestasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan usaha atau bahkan menyebabkan kegagalan operasional.

Pihak yang menentukan berhasil atau tidaknya Program Pengembangan Industri Rumahan adalah Tim Pelaksana IR daerah, selain DPPPA ada juga BAPPEDA yang mengkoordinasikan dari sisi program anggarannya, kemudian dinas terkait seperti KUKM, perdagangan sampai dengan pemerintah desa. Disitulah peran kunci dari tim pelaksana dan kebetulan komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo sampai dengan Tim Pelaksana IR sudah sangat baik untuk mendukung program ini. Yang cenderung menghambat adalah pelaku IR itu sendiri yang seringkali malas mengurus perizinan usahanya serta persyaratan dari perbankan yang seringkali agak menyulitkan pelaku IR untuk mengakses permodalan. Kendala yang dialami Kabupaten Wonosobo setelah Program ini diserahkan kepada Dinas PPPA sangat minim karena sinergi yang baik antara pendamping lokal desa dan tim pelaksana IR di tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten. Replikasipun sudah dilaksanakan di beberapa desa, serta mendapatkan dukungan anggaran dari dana cukai rokok/DBHCHT serta dukungan dari APBD kabupaten. Selain itu bantuan produksi APD dan akses terhadap kartu prakerja juga dilakukan dimasa pandemi Covid ini.

Sejauh ini tidak ada pelaku IR yang tidak mau bergabung dalam kelompok apabila diadakan pertemuan mereka pasti sangat antusias untuk bergabung. Apabila mereka tidak hadir itu pasti karena urusan keluarga yang sangat mendesak seperti anggota keluarga meninggal dsb. Sejak awal adanya program ini di Desa Ngadikusuman banyak sekali yang berminat mengikuti program ini namun memang jumlah penerima manfaat dari program ini dibatasi. Kebermanfaatan yang dirasakan setelah adanya program ini dirasa masih kurang karena pendataan belum terlaksana secara berkesinambungan, hal ini dikarenakan anggarannya yang terbatas. Besar harapan agar kedepannya bisa mengajukan anggaran yang lebih besar lagi untuk pemberdayaan ekonomi perempuan termasuk untuk pendataan tahunan Industri Rumahan karena updating data sangatlah penting.

Tidak ada hambatan yang ditemui oleh pelaku IR ketika mengurus perizinan maupun sertifikasi produknya, hal ini disebabkan karena informasi terkait sertifikasi produk dan usaha pelaku IR bersubsidi semuanya telah diinfokan oleh Dinas PPPA ke pelaku IR. Namun untuk pengurusan perizinan kendalanya lebih kepada SDM Industri Rumahannya, dimana mereka seringkali tidak berani untuk mengurus sertifikasinya sendiri sehingga harus didampingi oleh

pendamping IR, disitulah pentingnya peran pendamping untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Selain itu juga pengurusan perizinan saat ini lebih banyak dilakukan secara online, sedangkan banyak pelaku usaha yang tidak memiliki e-mail aktif dan kurang familiar dengan IT terutama pelaku yang sudah berusia tua.

4. Kesimpulan dan Saran

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui Program Pengembangan Industri Rumahan akan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha industry rumah tangga itu sendiri. Hal ini karena karakteristik pelaku industry rumah tangga yang unik. Oleh karena itu Diperlukan monitoring dan evaluasi kepada perempuan Pelaku Industri Rumahan dalam bentuk updating data secara berkala agar tercipta data time series yang berkelanjutan, hal ini tentunya akan mempermudah perempuan Pelaku Industri Rumahan untuk mengakses permodalan ataupun pelatihan yang diberikan oleh instansi lain diluar Dinas PPPA karena Desa dan Dinas memiliki database yang kuat.

Daftar Pustaka

- Andreas. 2011. *Manajemen Keuangan UKM*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hartati, E., Nurdin, N., dan Rivai, F.H. 2024. Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo. *Journal Of Public Policy and Applied Administration*. 6 (1): 29-44.
- Hikmah, Miftahul. 2015. Pemberdayaan Perempuan Pada Home Industry Sulam Kain Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industry Sulam Kain di Dusun Selorentek Desa Karanganyar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Skripsi. Jawa Timur: IAIN Kediri.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afandi, M. W. 2024. Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10 (9), 462-469.
- Indriyatni. Lies. 2013. Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Pada Usaha Kecil Di Semarang Barat). Vol 5 No 1 (2013): VOLUME 5 NOMOR 1 EDISI FEBRUARI 2013
- Kemen PPPA. 2016. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan. Jakarta:
- Moleong, Lexy J. , 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Setiawan, Achmad Tantowi Hendra, Yuliati, Nanik, dan Imsiyah, Niswatul. 2018. Peran Pemberdayaan Perempuan terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga di PKBM Ngupoyo Ilmu Muncar Kabupaten Banyuwangi. Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, [S.I.], v. 2, n. 2, p. 21-23, oct. 2018. ISSN 2622-2353.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Diterima: 16 Maret 2025

Disetujui: 21 Maret 2025

Dipublikasikan: 30 April 2025